

EVALUASI PROGRAM PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melelengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
RISKI AKBAR
NIM: 105190240**

**Pembimbing:
Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H
Yunita Elianda, M.I.P**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juni 2023



Riski Akbar

NIM. 105190240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi - Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren - Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "Evaluasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Jambi" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 20 juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 20 juli 2023

Dekan,


Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Drs. H. Sulaeman M.H.I
NIP. 196110051995031001


(.....)

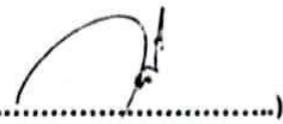
Sekretaris Sidang : Awaludin S. Ag
NIP. 196911202003121002


(.....)

Penguji I : Dr. Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI
NIP. 197201162000032003


(.....)

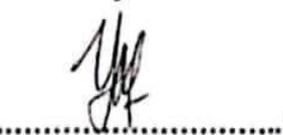
Penguji II : Dodi Sulistio, M.H
NIP. 199110272020121005


(.....)

Pembimbing I : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H
NIP. 199204052018011003


(.....)

Pembimbing II : Yunita Elianda, M.I.P
NIDN. 2006069501


(.....)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.II
Pembimbing II : Yunita Elianda, M.I.P
Alamat : Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Juni 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di --
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Riski Akbar yang berjudul "EVALUASI PROGRAM PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS (STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.II
NIP. 199204052018011003

Pembimbing II



Yunita Elianda, M.I.P
NIDN. 2006069501

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(QS Ar Rad:11)¹

¹ Departemen Agama, *Mushaf aysah: Al-quran dan terjemahan* (bandung : jabal Rudhotul Janna, 2010),

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang mana ia sudah membagikan nikmat iman, nikmat islam serta nikmat kesehatan, serta saya berterimakasih kepada seluruh orang yang terus berikan semangat serta doa, sehingga skripsi saya ini bisa dituntaskan dengan baik.

Serta tak lupa pula saya kirimkan Sholawat dan salam kepada Junjungan Kita ialah Nabi Muhammad SAW, Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada Orang Tua saya ialah (Ibu,Ayah),Abg, kk Dan Terima kasih juga kepada Adik saya sebab beliaulah yang sudah membagikan Semangat yang tidak berhenti mendo'akan saya, dengan dorongan yang hebat sehingga membuat saya semangat buat menuntaskan skripsi ini. Mudah- mudahan Ibu dan Ayah memperoleh
balasan Surga- Nya
(*Aamiin Ya Allah*)

Teruntuk sahabat- sahabat ku yang sangat ku sayangi yang sepanjang ini bersama-sama menemani akademisiku dikampus clas IP Seangkatan 2019, terimakasih telah banyak membagikan cerita dalam hidupku banyak berbagi pengalaman serta pula cerita yang sudah kita lalui sepanjang lebih kurang 4 tahun ini.

Teruntuk temanku sekaligus sahabat terima kasih juga telah membantu dan mengajari serta mensupport.

Terimakasih pula Saya ucapkan kepada segala pihak yang ikut serta dalam kesuksesan di hidup saya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu- persatu. Mudah- mudahan Allah SWT. Senantiasa membalas kebaikan semua
(*Aamiin ya Rabb*).

ABSTRAK

RiSKI AKBAR (NIM. 105190240), “Evaluasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pmks (Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi)” (dibimbing oleh **Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H** dan **Yunita Elianda, M.I.P**). Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Jambi semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Kota Jambi juga mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Susila Lainnya Dalam Wilayah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah gepeng di Kota Jambi melalui usaha pembinaan. Rumah Singgah merupakan rumah yang disediakan oleh pemerintah untuk membina para gepeng tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pembinaan dinas sosial Kota Jambi dalam mengurangi gelandangan, pengemis di Kota Jambi dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan program pembinaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Input* yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya pendukung masih belum optimal, *Process* yang dilakukan yaitu pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik, *Output* yang ada yaitu jumlah gelandangan dan pengemis tahun 2022 lebih meningkat, *outcomes* positif yang ada yaitu adanya kerja sama antar beberapa pihak untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan dampak negatif yaitu masih ada rasa tidak jera gepeng yang sudah terjaring. Faktor yang menjadi penghambat program pembinaan dinas sosial Kota Jambi adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana (2) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (3) Sikap klien dalam proses pembinaan.

Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Gelandangan & pengemis

ABSTRACT

RISKI AKBAR (NIM. 105190240), “Evaluation of the Pmks Social Welfare Problem Program (Study at Jambi City Social Services)” (supervised by Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H and Yunita Elianda, M.I.P).

The number of homeless people and beggars in the city of Jambi has increased so that they have begun to unsettle the community, reduce comfort and order in public places. Jambi City also issued Jambi City Mayor Regulation Number 7 of 2018 Concerning Handling of Homeless, Beggars, Displaced Persons and Other Prosecutors in Jambi City Area. The Jambi City Government has also made various efforts to reduce the number of sprawl in Jambi City through coaching efforts. The Halfway House is a house provided by the government to foster these beggars. This study aims to determine the Jambi City social service development program in reducing homeless people, beggars in Jambi City and to find out what factors are the obstacles to the coaching program. The research method used through a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the input consists of human resources, supporting resources are still not optimal. The process that is carried out is mental/aqidah development and physical development. The output is that the number of homeless and beggars in 2022 has increased, the positive outcomes are there is cooperation between several parties to assist in the implementation of coaching and the negative impact is that there is still a feeling of not being sprawled that has been netted. Factors that inhibit the Jambi City social service development program are (1) limited facilities and infrastructure (2) limited human resources (HR) (3) client's attitude in the coaching process.

Keywords: Evaluation, Coaching, Hom

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, Yang telah memberikan Rahmat dan PetunjukNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatNya kejalan islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Stara Satu (S.I) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul *“EVALUASI PROGRAM PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS (STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI)”*

Dalam rangka proses tersusunya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H Su’aidi Asy’ari M.A., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., M.A., MIR sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abd Gani, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum, sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Wenny Destina, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak **Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H** selaku pembimbing I dan Ibu **Yunita Elianda, M.I.P** selaku pembimbing II.
6. Bapak dan ibu dosen Asisten dosen, beserta seluruh karyawan /karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karnanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran berupakan kritikan maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah SWT. Kita mohon ampunan-nya, dan kepada sesama manusia kita mohon maaf. Semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat diterima oleh Allah SWT.

Jambi, Juni 2023

Penulis,

Riski Akbar
NIM. 105190240

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	I
PENGESAHAN MUNAQSAH.....	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN	IV
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	V
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR SINGKATAN.....	XIII
BAB I : PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	17

BAB II : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi dan Penelitian	22
C. Jenis dan Sumber Data.....	22
D. Teknik Pembumpulan Data	23
E. Teknik Analisa Data	25
F. Jadwal Penelitian	27

BAB III : GAMBARAN UMUM BKD

A. Sejarah Dinas Sosial	28
B. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Struktur Organisasi	31
D. Visi dan Misi	33
E. Sumber Daya Manusia	35
F. Potensi	37

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Evaluasi program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.	43
B. Kendala program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.....	54
C. Upaya Program Dinas Sosial Kota Jambi dalam Menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.....	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Perkembangan Pengemis 2018-2020	7
Tabel 2.1 Daftar Informan.....	25
Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	36
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Menurut Eselon.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Disos

Perda

PP

Perbup

UU

DAFTAR SINGKATAN

: Dinas Sosial

: Peraturan Daerah

: Peraturan Pemerintah

: Perayuran Bupati

: Undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada nilai- nilai dasar pancasila, di mulai dengan “Ber-Tuhan” yang merupakan pengamalan akan sila pertama pancasila, “Berempati-Manusia” sebagai bentuk pengamalan akan sila ke 2 pancasila, “Bersatu” perwujudan akan sila ke 3 pancasila, “Demokrasi Perwakilan” sebagai bentuk perwujudan sila ke 4 pancasila, dan yang terakhir yang tidak kalah berarti dari ke 4 sila sebelumnya ialah “Adil Sosial” yang ialah pengamalan hendak sila ke 5.

Khusus untuk sila ke 5 pancasila tentang keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dikatakan bahwa tiap sektor baik pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik harus terletak pada taraf yang merata, dan adil untuk tiap orang, baik dari masyarakat kalangan atas (Pejabat publik, pejabat swasta, serta pengusa- pengusaha non privat),² masyarakat golongan menengah semacam PNS (Pegawai Negara Sipil), pekerja sosial, pengusaha-pengusaha kecil, ataupun warga golongan kecil seperti Pemulung, anak terlantar, dll.³

Kehidupan sejahtera adalah kehidupan yang didambakan oleh semua manusia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Namun, tidak selalu kehidupan sejahtera yang didambakan itu,

² wesbite resmi kemensos.go.id diakses pada 18 Maret 2023

³ Landupari, A. T., D. Setyawan, and D. U. Ra'is. "Implementasi Kebijakan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)." PhD diss., Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2022.

dapat diraih oleh semua orang. Untuk itulah diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari setiap individu untuk menggapai kehidupan sejahtera yang diidamkannya. Negara berperan memfasilitasi dan menjamin setiap warga secara adil untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Hal inilah yang dicita-citakan founding fathers bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-5 dasar negara, Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu juga termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat saat ini masih menjadi fenomena yang menarik karena cukup sulit untuk mewujudkannya, dimana di era otonomi daerah saat ini semakin terlihat jelas bahwa daerah memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang rendah, dan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai sumber daya yang dimilikinya, seperti dalam semangat otonomi daerah dalam upaya membangun daerah seluas-luasnya.⁵

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dengan ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang

⁴ Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2015): 243-260.

⁵ Susanti, Risa. "Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Tasikmalaya." *Jak Publik (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)* 1, no. 3 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Permasalahan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi kesejahteraan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi. Kesejahteraan sosial dapat diterapkan melalui pembangunan nasional yang merata. Pembangunan kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai usaha terencana dan terarah yang meliputi berbagai intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial.⁶

Semakin besarnya tingkat kemiskinan, semakin tinggi pula kesulitan atau permasalahan hidup yang harus dihadapi. Kalau kita melihat negara-negara maju, mereka menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan serta angka kemiskinan yang relative cukup kecil dibanding negara-negara sedang berkembang dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP mereka juga relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya

⁶ Nurliani, Ivo. "Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak (Studi Kasus Masalah Fakir Miskin).", Perpustakaan Unri hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi masalah itu sendiri di suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi negara-negara lain, tidak terkecuali Indonesia.

Pengambilan kebijakan yang salah dalam pemanfaatan bantuan dan atau pinjaman negara lain, justru akan berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan. Demikian pula adanya arus perputaran perekonomian dari waktu ke waktu didalam sebuah perekonomian. Namun, bentuk arus untuk perekonomian dimana pemerintah ikut di dalamnya sehingga bukan perekonomian swasta lagi tidaklah akan menyimpang dari prinsip itu, mengingat pemerintah merupakan unsur pengatur dan penyeimbang perekonomian secara keseluruhan.⁷

Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan agenda pembangunan negara. Oleh karena itu, UUD 1945 mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam era otonomi daerah, pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait tetapi juga menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Hampir setiap daerah terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut, baik itu di wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan.⁸

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

⁷ Yunus, Eko Yudianto. "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 3, no. 1 (2021): 62-70.

⁸ Sahrul, Muhammad. "Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kota Depok." *KAJIAN*: 36.(2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa negara bertanggungjawab atas penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial, diantaranya meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Adapun menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos RI) Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, PMKS teridentifikasi dalam tujuh isu strategis, yaitu (1) fakir miskin, (2) lanjut usia terlantar, (3) penyandang cacat, (4) anak terlantar, (5) anak jalanan, (6) anak balita terlantar dan (7) gelandangan dan pengemis atau tunawisma.⁹

Kota besar menjadi magnet yang sangat kuat untuk menarik penduduk berpindah dari desa ke kota (Urbanisasi). Banyak alasan yang muncul melatarbelakangi adanya urbanisasi tersebut misalnya untuk mencari

⁹ Nagaring, Denny David, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)." *GOVERNANCE* 1, no. 2 (2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pekerjaan, usaha, melanjutkan pendidikan dan lainnya sebagainya¹⁰. Hal ini dapat terjadi di kota yang perkembangan perekonomian yang sangat pesat seperti halnya yang terjadi di kota Jambi. Daya tarik kota Jambi sebagai pendatang baru adalah kehidupan di kota Jambi lebih modern. Sarana dan prasarana lebih lengkap, banyaknya lapangan pekerjaan di kota Jambi, dan merupakan salah satu pusat industri pusat perdagangan baik barang maupun jasa di Provinsi Jambi.

Banyak pendatang dari luar kota Jambi yang mencoba mencari peruntungan di kota Jambi, tetapi tanpa di bekali dengan pendidikan, kecakapan serta pengalaman yang cukup untuk menghadapi persaingan. Kurangnya pendidikan, kecakapan dan pengalaman inilah yang menjadi peluang meningkatnya gelandangan dan pengemis di Kota Jambi. Jika dilihat dari data Badan data terpadu (BDT) tahun 2020.

Kota Jambi memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jambi yaitu sekitar 606.200 orang dan dari jumlah tersebut sekitar 144,149 jiwa masih tergolong miskin, 26.741 adalah fakir miskin, dan jumlah tersebut meningkat setiap tahunnya.¹¹Salah satu faktor penyebab dari tingginya jumlah masyarakat miskin yaitu susahny lapangan pekerjaan karena rasio lapangan pekerjaan hanya sebesar 7,58%. Susahny lapangan pekerjaan menyebabkan masyarakat menjadi pengangguran dan tidak dipungkirin menjadi gelandangan atau pun pengemis. Itu menyebabkan perekonomian

¹⁰ Ayunda,Rahmi. Disemadi, Hari Sutra. Wijaya,Rian.(2020). *Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam* : Suatu Kajian Hukum Prespektif SDGs. Jurnal Komunitas Yustia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 3 No 3 .Hlm, 295-296

¹¹ Badan Data Terpadu (BDT) Kota Jambi 2020” <https://jambikota.bps.go.id/publication>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tergangguan dan tatanan kota menjadi buruk. Gelandangan dan pengemis muncul akibat pembangunan yang tidak merata yang mendorong warga miskin di perdesaan dan daerah-daerah dengan ekenomian kurang baik mengadu peruntungan ke kota besar¹², dan di Provinsi Jambi, Kota Jambi menjadi tempat tujuan karena kota besar dan perekonomian tertinggi di provinsi Jambi.

Tabel 1.1
Data Perkembangan Gelandangan Dan Pengemis
Di Kota Jambi 2018-2020¹³

JENIS PMKS	TAHUN		
	2018	2019	2020
Gelandangan	15	15	199
Pengemis	23	51	80
JUMLAH	38	66	279

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya gelandangan dan pengemis ialah keadaan lingkungan yang kotor. Pada umumnya gelandangan tinggal atau tidur di teras-teras toko, bahkan dibawah jembatan. Tentunya permasalahan tersebut makin meningkatkan permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan yang ada di kota Jambi dan tentu saja penulis mengamati berdasarkan masalah diatas perlu adanya evaluasi terhadap

¹² Kompas.com, "Diperkirakan ada 77. 500 gepeng di kota kota besar di Indonesia", di akses pada 18 Januari 2023.

¹³ Data Perkembangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi 2018-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

program PMKS yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi dalam menekan angka kemiskinan dan kesejahteraan sosial melalui langkah-langkah yang tentu saja nantinya akan berdampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian yang pada akhirnya mampu menekan angka peningkatan PMKS yang ada di kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh dalam bentuk Penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS (Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini yang hendak di cari jawabannya oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana evaluasi program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi?
3. Upaya program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terfokus pada rehabilitasi pengemis dan gelandangan pada dinas sosial mengenai evaluasi program permasalahan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kota Jambi. Hal tersebut disebabkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kurang nya waktu yang dimiliki oleh peneliti sehingga perlunya pembatasan masalah dalam penelitian ini supaya tidak melebar kemana-mana.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui evaluasi program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Teoritis, Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sektor dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Jambi sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.
- b. Akademik, Penelitian ini berguna bagi dunia akademik khususnya dalam program studi ilmu pemerintahan UIN STS Jambi dan berguna bagi penelitian selanjutnya.
- c. Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Jambi. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.
- 2) Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
- 3) Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- 4) Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan, dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.
- 5) Sebagai sumber referensi dan juga dapat memberikan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat

E. Kerangka Teori

1. Evaluasi

a. Defenisi Evaluasi

Evaluasi diartikan sebagai proses memberikan nilai terhadap sesuatu dengan menggunakan kriteria. *"Evaluation is to give value something with the criterion"*. Dalam menentukan nilai suatu objek dirujuk dan/atau dibandingkan dengan kriteria evaluasi yakni (a) ada objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang dinilai (b)ada kriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan nilai dan (c) ada perbandingan antara hasil penilaian dengan kriteria.¹⁴

b. Tujuan Evaluasi

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Meninjau tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi maka dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satunya tujuan evaluasi adalah menguku berapa besar dan kualitas pengeluaran atau (output) dari suatu kebijakan
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut evaluasi ditunjuk untuk melihat dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.
- 6) Untuk bahan masukan (*input*) dan sebagai kebijakan yang akan datang.¹⁵

Menurut Bridman dan Davis Teori evaluasi meliputi *Input, Process, Output, Outcomes*.

¹⁴ Nana Sudjana, *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, hlm. 31

¹⁵ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta , 2012, hlm. 120-122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) *Input*

Input merupakan analisis individu yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber sumber yang tersedia, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan program.

2) *Process*

Process ini menunjuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program, siapa orang yang bertanggung jawab atas program dan kapan kegiatan akan selesai.

3) *Output*

Output hasil dari suatu proses, baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah.

4) *Outcomes.*

Outcomes mengetahui dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program.

Indikator-indikator yang akan disampaikan pada teori kali ini yaitu adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini mengarah kepada evaluasi program penyanggah masalah kesejahteraan sosial.
- 2) Kebijakan yang diambil pemerintah terkait permasalahan penyanggah kesejahteraan Sosial Masalah kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.¹⁶

2. Kebijakan

¹⁶ Bridgman, P., & Davis, G. (2003). What use is a policy cycle? Plenty, if the aim is clear. *Australian Journal of Public Administration*, 62(3), 98-102.

a. Defenisi Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak . Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.¹⁷

b. Jenis-Jenis Kebijakan

Disamping kita mengenal berbagai tingkatan kebijakan, pada dasarnya kebijakan juga dapat dibedakan dalam beberapa jenis, sesuai sasaran atau objek apa yang mendasari lahirnya sebuah kebijakan tersebut. Secara tradisional, para pakar ilmuwan mengategorikan kebijakan public ke dalam kategori: (1) kebijakan substansi (misalnya: kebijakan pendidikan,

¹⁷ Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta. 2011. hlm. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri, dan sebagainya), (2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen), dan (3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya: kebijakan masa Reformasi, kebijakan masa Orde Baru, dan kebijakan masa Orde Lama).¹⁸

3. Kesejahteraan Sosial

a. Defenisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga

¹⁸ H.M. Hasbullah, kebijakan Pendidikan, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, 2015. hlm. 52

Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial adalah usaha memberikan pelayanan bagi mereka serta memberikan kenyamanan dan ketentraman hidupnya baik dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani maupun mental yang baik. Upaya memajukan kesejahteraan umum di Indonesia, secara konstitusional jelas bukan merupakan sebuah program filantropis. Pun secara empirik, kemampuan Negara untuk berderma kepada rakyatnya juga nyata-nyata tidak memadai.

Tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum ini bersanding dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan tujuan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama :

- 1) Ketika masalah sosial dapat dimenasi atau direncanakan dengan baik, kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraannya tergantung kepada kemampuan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah.
- 2) Ketika kebutuhan terpenuhi, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasirelasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

c. Fungsi kesejahteraan sosial

Adapun fungsi kesejahteraan sosial diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Penyembuhan

Fungsi penyembuhan yaitu menghilangkan suatu kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar dapat berfungsi kembali secara wajar di dalam masyarakat.

2) Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan adalah memperkuat suatu individu, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3) Fungsi Pengembangan

Fungsi pengembangan adalah memberikan sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu proses pembangunan atau pengembangan tatanan dari sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang adalah suatu kegiatan untuk membantu tercapainya tujuan dalam sektor ataupun bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian tidak terlepas dari pengelohan data melalui referensi buku- buku atau literatur studi pemerintah Tinjauan Pustaka adalah hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian- penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus atau tema yang diteliti. Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, seperti judul berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nursal dengan judul Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Dinas Sosial Kota Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada penelitian ini membahas tentang kinerja pegawai dalam program PMKS anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Kinerja pegawai dalam program ini menggunakan lima indikator kinerja yaitu produktivitas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dengan penentuan 5 informan dan menggunakan tehnik purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam mengelola dan menjalankan program PMKS anak jalanan ini sudah baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan produktivitas pegawai yang dapat mengurangi jumlah serta meningkatkan pembinaan anak jalanan kemudian dari aspek kualitas layanan yang cukup baik dengan meningkatkan pelayanan dari segi fasilitas dan kepercayaan masyarakat kemudian dari aspek responsivitas dengan mengenali masalah dan mencari solusi terhadap laporan dari warga terkait anak jalanan kemudian dari aspek responsibilitas yaitu dengan menjalankan program dengan baik dan sesuai prinsip standar oprasional yang telah ditetapkan. serta akuntabilitas kinerja yang dijalankan sudah berdasarkan aturan yang berlaku.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Firdayanti dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Melalui Program Desaku Menanti (Studi di Kampung Topeng Malang Dusun Baran Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang)

²⁰ Nursal, M. (2021). Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Dinas Sosial Kota Makassar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.hlm. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Universitas Brawijaya. Hasil dari pada penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, serta alat-alat yang mendukung dalam penelitian.²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Topeng Malang terdiri dari Pembinaan diri dan pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan fisik, mental, dan sosial ; bimbingan keterampilan; dan bimbingan pendidikan. Kedua yaitu pengembangan usaha ekonomi kreatif di Kampung Topeng Malang untuk dapat menambah penghasilan masyarakat. Aktor-aktor yang terlibat meliputi Dinas Sosial, LKS Insan Sejahtera, Pekerja Sosial, Dana Bantuan Usaha (CSR), serta pihak-pihak lain yang dapat mendukung dalam proses pemberdayaan di Kampung tersebut. Hasil pemberdayaan dalam aspek ekonomi yaitu (1) Masyarakat sudah mempunyai usaha di bidang kuliner, sebagian lagi sebagai pegawai toko oleh-oleh milik Dinas Sosial Kota Malang, sedangkan sebagian lagi menjadi buruh pabrik di Bengkel Kerja Desaku Menanti, (2) masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sudah dibekali dengan pelatihan baik ternak maupun berdagang untuk mengurangi angka

²¹ Firdayanti, S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Melalui Program Desaku Menanti (Studi di Kampung Topeng Malang, Dusun Baran, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pengangguran. Dalam aspek sosial keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata sudah mulai tumbuh dengan adanya koordinator kampung. Selain itu, masyarakat juga diberikan fasilitas pendidikan kejar paket agar bisa digunakan sebagai melamar pekerjaan. Bagi masyarakat yang masih kedatangan kembali mengemis akan diberikan sanksi berupa teguran/lisan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Dewantoro dengan judul Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam menangani masalah Pengemis di Kota Tangerang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan hasil penelitian yaitu Penanganan pengemis merupakan tanggung jawab Dinas Sosial dalam melihat fenomena pengemis di Kota Tangerang sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.²² Permasalahannya, kurangnya penegakkan perda nomor 5 tahun 2012, para pengemis umumnya berasal dari luar Kota Tangerang, lemahnya pengawasan dari Hasil penelitian bahwa penegakkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 masih berjalan kurang maksimal, para pengemis mayoritas berasal dari luar Kota Tangerang dan kembali melakukan mengemis walaupun sudah dilakukan pembinaan, proses pengawasan terhadap pengemis masih belum berjalan dengan baik dan belum tersedianya lahan untuk pembuatan Panti Rehabilitasi Sosial sendiri dan masih terdapat masalah

²² Dewantoro, A. (2022). Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Pengemis di Kota Tangerang. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

di bagian Program, Anggaran dan juga Prosedur. Saran, Penegakkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 dengan memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat, memastikan jumlah pengemis bisa berkurang setiap bulannya, melakukan pengawasan lebih giat lagi kepada para pengemis, dan segera membuat Panti Rehabilitasi Sosial sendiri di Kota Tangerang.

Dari ketiga peneliti tersebut ada beberapa perbedaan antara peneliti dahulu dengan peneliti yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini. Peneliti di atas lebih mengarah kepada bagaimana menjalankan program PMKS dan pengelolaan program kesejahteraan Sosial itu saja, sedangkan fokus peneliti yang akan diteliti pada kali ini yaitu peneliti berfokus pada evaluasi program penyandang Masalah kesejahteraan Sosial PMKS yang diteliti pada Dinas Sosial kota Jambi. Peneliti ingin melihat sejauh mana peran serta pemerintah dalam program penyandang kesejahteraan Sosial dan bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam program ini, tentunya akan banyak menimbulkan pertanyaan apakah dapat diselesaikan dengan baik ataukah tidak. Fokus penelitian inilah yang menjadi perbedaan yang dirasa peneliti penting guna menciptakan kebaruan dalam bidang penelitian yang nantinya akan bermanfaat bagi dunia akademik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang di lakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang di butuhkan terkumpul kemudian kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Jambi, dengan subjek penelitian mengenai evaluasi program PMKS dikota Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang di perlukan dalam penelitian, yang di peroleh secara langsung dari sumbernya, ataupun dari lokasi objek penelitian, keseluruhan data hasil penelitian yang di peroleh di lapangan Dalam hal ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang

²³ Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2011) hlm.

diperoleh secara langsung melalui Observasi lapangan dan melalui wawancara terhadap pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengetahui Evaluasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS (Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan oleh orang melakukan penelitian dari data yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan kajian penelitian. Data sekunder merupakan data primer yang telah di olah lebih lanjut dan di sajikan dengan baik pihak pengumpul data data primer atau pihak lain. Dengan kata lain data sekunder adalah data sejumlah keterangan yang di peroleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara, data yang di maksud adalah data berupa dokumen - dokumen Evaluasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS (Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi)

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh sumber data juga disesuaikan dengan instrument dari pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan materi berupa barang dan benda yang berbentuk seperti apa saja program-program yang sudah dijalankan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Observasi

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan, melalui penglihatan penciman, pendengaran, peraba, pengecap. Jadi dalam artian teknik observasi dapat di lakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Maka peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Sebagai objek penelitian ini dengan menggunakan teknik obsevasi non parstisipan. Kedudukan peneliti hanyan sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan–catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.²⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang hanya diperoleh dengan cara bertanya langsung dari responden. Intrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dekumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur sebagai intrumen pelengkap observasi dalam pengumpulan data terkait Evaluasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS (Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi).²⁵

²⁴ Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Jambi: Syariah Press 2014) hlm. 37

²⁵ Singaribun dan Sofia Effendi, *Metode Penelitian Surve* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008) hlm,192



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 2.1
Daftar Informan

NO	NAMA	JUMLAH
1	Pegawai Dinas Sosial Kota Jambi	4
2	Pengemis	2
3	Fakir miski	2
4	Gelandangan	2
5	Lanjut usia terlantar	3

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peristiwa penting yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi informasi diperoleh dari macam – macam sumber tertulis atau karya yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni dan karya fikir.²⁶

Dokumentasi ini diperlukan untuk melengkapi data dari pengguna data observasi dan wawancara. Dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan evaluasi program penyandang masalah kesejahteraan sosial di dinas sosial kota jambi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari data dan bahan lain dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

²⁶ Matthew Miles B, Huberman A. Miche, *Analisis data kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

akan penulis analisis dengan metode indukatif yaitu analisis dengan cara memperoleh dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang diperoleh dilapangan tempat penelitian baik berupa catatan, gambar, foto, dan dokumentasi lainnya yang kemudian diperiksa dan diurutkan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam lapang ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, dalam hal ini reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan perubahan data kasar yang diperoleh dari data lapangan, reduksi data secara dilakukan terus menerus selama proses penelitian langsung. Masalah evaluasi program penyandang masalah kesejahteraan sosial di dinas sosial kota jambi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan informasi dari reduksi yang kemudian disajikan dalam laporan dan dapat dipahami dengan mudah. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkinkan.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari kegiatan bentuk yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan dalam masa penelitian berlangsung. Sehingga kesimpulan ini dapat dianalisis terkait Evaluasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS (Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi).

G. Jadwal Penelitian

Tabel 2.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		X																		
2	Pembuatan Proposal					X															
3	Perbaikan Proposal dan Seminar																				
4	Surat Izin Riset																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Pengolahan dan Analisis Data																				
7	Pembuatan Laporan																				
8	Bimbingan dan Perbaikan																				
9	Agenda dan Ujian Skripsi																				
10	Perbaikan dan Penjilidan																				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Jambi

Dinas Sosial Kota Jambi merupakan salah satu instansi pemerintahan yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.156 Thehok Kota Jambi. Dinas Sosial dikepalai oleh Drs. Noviarman, M.E. Dinas Sosial Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Perda Nomor 14 Tahun 2016 ini merupakan revisi atas Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernama Dinas Sosial dan Tenaga Kerjadan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 Tahun 2016.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi merupakan salah satu Dinas Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan Bidang Sosial. Secara legal, Dinsos Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Perda Nomor 14 Tahun 2016 ini merupakan revisi atas Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi, menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja . Dari hasil Pemetaan Urusan yang sudah di validasi dengan Pemerintah Pusat, Skor Urusan kelembagaan yang menangani urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sosial di Kota Jambi berada pada Dinas Tipe A. Dan pada akhirnya menjadi Dinas yang berdiri sendiri, yang mana sebelumnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi Menjadi Dinas sosial kota Jambi dengan level eselon II yang notabene merupakan level eselon yang tertinggi bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota.²⁷

B. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi

1. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Jambi

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD di Kota Jambi. Pendirian Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi maka Dinas Sosial mempunyai TUGAS POKOK yaitu : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang meliputi :

Tugas Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang meliputi bidang perlindungan

²⁷ Hukum dinas sosial kota Jambi diakses pada 14 April 2023 pukul 00:54 Wib.

dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

2. Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas sosial;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas sosial;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan dinas sosial di daerah;

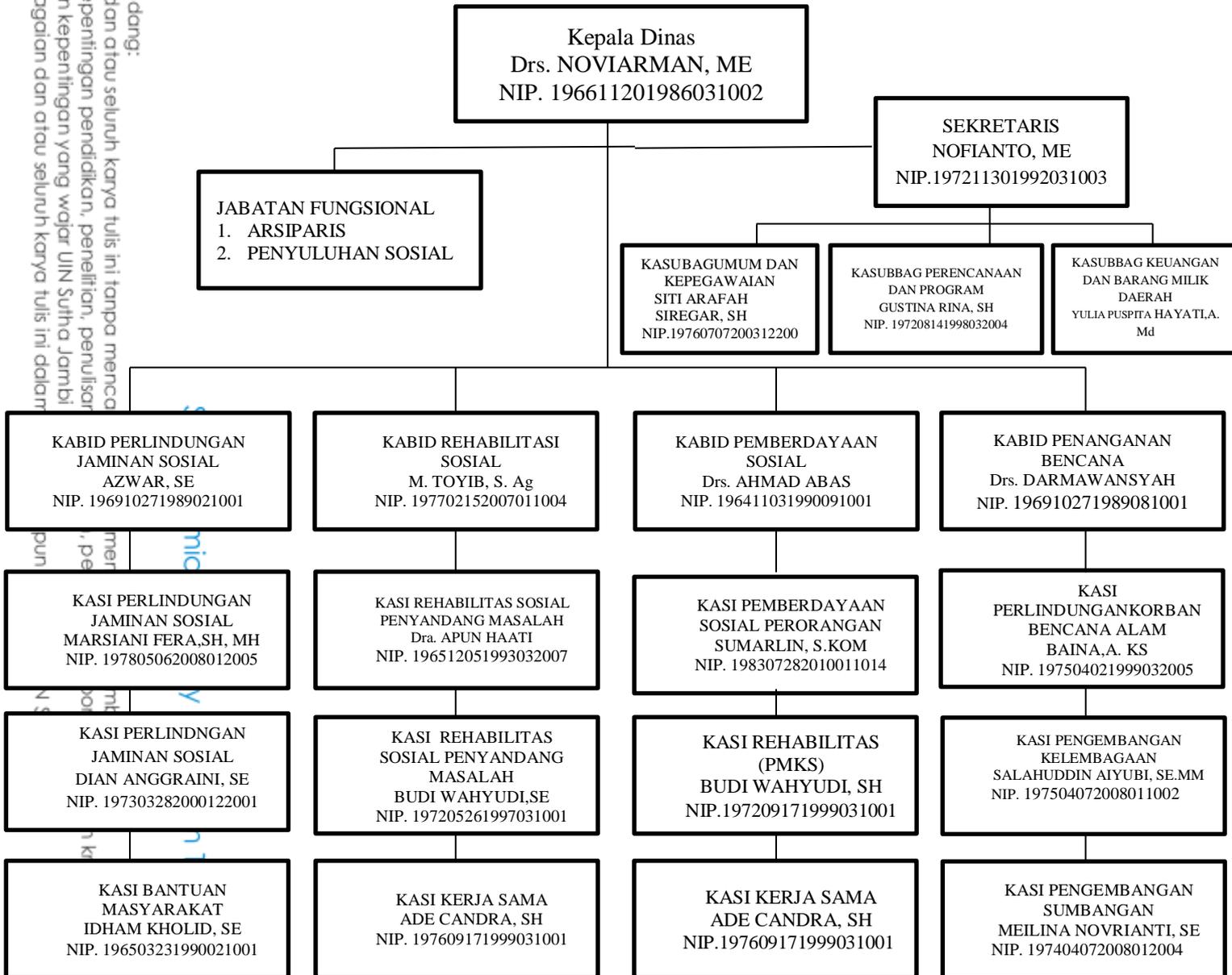


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

C. Stuktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi

Gambar 3.1
Stuktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi 2023



Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun Struktur Organisasi Kepegawaian dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan pada Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari :

1. Unsur pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu :
 - a. Sekretaris, yang dibantu oleh :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang dibantu oleh:
 - 1) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 2) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 3) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang dibantu oleh:
 - 1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - 3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban Napza



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial , yang dibantu oleh:
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.
 - 2) Kepala Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
 - 3) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
 - e. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang dibantu oleh :
 - 1) Kepala Seksi Pendataan Informasi Fakir Miskin.
 - 2) Kepala Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.
 - 3) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan Fakir Miskin.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Unsur Pelaksana

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi dapat dilihat pada Daftar Lampiran I tentang Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi .²⁸

D. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Jambi

1. Visi

Merujuk kepada Visi Kepala Daerah Kota Jambi 2018-2023 adalah seb-

²⁸ Dokumen RPJM Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023

agai berikut: “MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Dinas Sosial Kota Jambi Mempunyai visi sebagai berikut: “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Bingkai Kearifan Lokal”.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

- a. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
- b. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
- c. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
- d. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
- e. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.²⁹

²⁹ Hukum dinas sosial kota jambi diakses pada 15 April 2023 pukul 19:05 Wib.

E. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD Dpnas Sosial Kota Jambi. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial.

Sumber Daya Personil SKPD yang merupakan faktor pendukung utama dalam melaksanakan program kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelayanan di Bidang Sosial sangat didukung oleh kualitas dan kuantitas jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kota Jambi.

Hal ini dapat dilihat dari Tabel Jumlah Pegawai menurut Jabatan Eselon, Pangkat, Golongan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Diklat Perjenjangan tahun 2023 Dinas Sosial Kota Jambi Tersebut dibawah ini yang terdiri dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan³⁰

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	<u>3 orang</u>
2.	Pembina Tk. I	IV/b	<u>3 orang</u>
3.	Pembina	IV/a	<u>1 orang</u>
4.	Penata Tk. I	III/d	<u>12 orang</u>
5.	Penata	III/c	<u>5 orang</u>
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	<u>2 orang</u>
7.	Penata Muda	III/a	=
8.	Pengatur Tk.I	II/d	<u>1 orang</u>
9.	Pengatur	II/c	<u>1 orang</u>
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	<u>3 orang</u>
11.	Pengatur Muda	II/a	=
12.	Juru	I/d	<u>1 orang</u>
13.	Juru Tk.I	I/c	<u>1 orang</u>
14.	Juru Muda Tk.I	I/b	<u>1 orang</u>
15.	Juru Muda	I/a	=
16.	Pegawai Honorer Kontrak	-	<u>20 orang</u>
	Jumlah		<u>54 orang</u>

³⁰ Subbag Kepegawaian Dinsos Kota Jambi Tahun 2023

Tabel 3.3

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Dan Eselon Tahun 2023³¹

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	II.b	1 <u>orang</u>
2.	Sekretaris	III.a	1 <u>orang</u>
3.	Kepala Bidang	III.b	4 <u>orang</u>
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	3 <u>orang</u>
5.	Kepala Seksi	IV.a	11 <u>orang</u>
6.	Tenaga Fungsional	-	-
6.	Staf Pelaksana	-	14 <u>orang</u>
7.	Pegawai Honorer Kontrak	-	20 <u>orang</u>

F. Potensi Sosial

Indonesia adalah sebuah negara di mana Konstitusi negara yakni UUD 1945 mewajibkan pemerintah membangun sebuah system kesejahteraan yang universal. Tetapi berdasarkan pengalaman negara-negara maju yang menganut ideologi ‘negara kesejahteraan atau “*Welfare State*” Menyerahkan sepenuhnya kepada Negara untuk urusan sosial security system bagi seluruh warga Negara lama-kelamaan membebani keuangan Negara dan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial pada level individu, keluarga atau komunitas/masyarakat. Dari berbagai sudut pandang

³¹ RPJMD Dinas SOSIAL Kota Jambi Tahun 2023

dan ukuran apapun, pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan Komunitas/masyarakat adalah yang paling murah biayanya.

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial memegang peran penting dalam pelaksanaan kegiatan pada SKPD Dinas sosial Kota Jambi, sumber Potensi dan sumber kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial, maka perlu adanya kemampuan dalam menggerakkan sumber daya dimaksud.

Oleh sebab itu Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang dapat digunakan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Apabila dapat digali dan dikembangkan, maka PSKS ini dapat mendukung secara berkelanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adapun Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang keberadaannya sangat diharapkan secara fungsional mampu berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk membantu sinkronisasi dan koordinasi program untuk menyelesaikan masalah sosial dimaksud diuraikan dibawah ini :

1. Sumber Daya Manusia Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang mencakup antara lain :
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial
 - b. Pekerja sosial Profesional

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- c. Relawan sosial
 - d. Penyuluhan sosial
 - e. Pendamping keluarga harapan
2. Pilar Partisipasi Usaha Kesejahteraan sosial yang mencakup antara lain :
 - a. Organisasi Sosial
 - b. Karang Taruna
 - c. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - e. Trauma Siaga Bencana
 - f. Program Keluarga Harapan (PKH)
 - g. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang terdiri dari (Kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban)
 3. Sarana dan Prasarana Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup antara lain :
 - a. Panti Sosial
 - b. Panti Rehabilitas dan Pelatihan
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 - d. Pusat Kesejahteraan Sosial
 - e. Rumah perlindungan Sosial
 - f. Legislasi Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

4. Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha

Pembangunan Kesejahteraan sosial tidak hanya tanggung jawab pemerintah Khususnya Dinas Sosial Kota Jambi, Namun juga tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

5. Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Program pengembangan manajemen kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme lembaga pelayanan Kesejahteraan sosial melalui penelitian masalah sosial dan pengembangan alternative, penataan system dan mekanisme kelembagaan serta peningkatan kualitas serana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

6. Nilai Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial merupakan potensi spiritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa. Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial merupakan nurani bangsa Indonesia yang tereplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi pengertian, kesederan, keyakinan, tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dari kemampuan masing-masing warga dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesame.

Nilai kesetiakawanan sosial tercermin dari sikap mental yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas, peka terhadap lingkungan sosialnya sehingga mendorong untuk peduli melakukan perbuatan bagi kepentingan lingkungan sosialnya tersebut.

Esensi Kesetiakawanan sosial adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tak terkecuali bagi organisasi lembaga publik dan dunia usaha yang dalam gerak kegiatannya membutuhkan dukungan dari masyarakat. Nilai kesetiakawanan sosial solidaritas sosial dan kearifan local merupakan potensi dan kekuatan Dinas sosial Kota Jambi dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan social Tenaga kesejahteraan Social Kecamatan (TKSK).

Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dibidang sosial sesuai dengan Renstra ini disamping sangat tergantung dari peran serta masyarakat dan dunia usaha, aparatur, diperlukan juga sikap mental, tekad dan semangat serta komitmen yang tinggi dari para penyelenggara. Faktor-faktor ini dapat dicerminkan pada kualitas dan professional dalam pengalaman serta koordinasi yang semakin mantap, sehingga hasilnya dapat menjadi optimal sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal dari upaya pembangunan bidang Sosial Kota Jambi, maka harus diawali dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang mantap dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

pengawasan yang kuat. Untuk keperluan dimaksud diharapkan ada dukungan kebijaksanaan Pemerintah Kota Jambi dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan, yaitu SDM, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sarana kebijakan program dan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan penyusunan Rencana kerja berikutnya. Untuk itu Perlu ditentukan kaedah pelaksanaan sebagai berikut :

Unit Kerja/Bidang dan Sekretariat Dinas Kota Jambi, masyarakat, dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renstra ini dengan sebaik- baiknya.

Unit Kerja/Bidang dan Sekretariat Dinas sosial kerja Kota Jambi dalam menyusun Renstra telah memuat Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang. Untuk itu dalam membuat program agar disesuaikan dengan RPJMD Kota Jambi yang nantinya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Unit Kerja/Bidang pada dinas sosial berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Jambi dengan Renstra Dinas Sosial Kota Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Evaluasi program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.

Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang relevan dan penting diperhatikan dalam rangka penanggulangan masalah kesejatraan dengan melaksanakan beberapa program pelaksanaan masalah PMKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi melalui bidang rehabilitasi masalah kesejatraan sosial yang ada dikota Jambi.

Dalam pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakukanya pembinaan, tentunya diperuntukkan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait dalam hal ini di Kota Jambi adalah Satpol PP dan WH ,sehingga upaya pembinaan tersebut nantinya diharapkan dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan gelandangan dan pengemis yang biasanya mengaharapkan dari orang lain dan tidak mandiri menjadi orang yang bisa kembali bekerja tanpa cara yang instan.

Dinas Sosial Kota Jambi dalam hal ini menyediakan yaitu rumah singgah untuk membina para gepeng. Di rumah singgah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan penanganan sosial klien yaitu:

1. Pendaftaran klien yang ditertibkan oleh Aparat Penegak Hukum maupun hasil Penjangkauan Tim Rehabilitasi Sosial Kota Jambi.
2. Pemeriksaan/ penyitaan barang/ uang klien.

3. Assesment oleh Pekerja Sosial.
4. Pembinaan fisik.
5. Pembinaan mental/ Aqidah.
6. Intervensi/ rujukan/ rekomendasi.
7. Penyerahan/reunifikasi kepada keluarga klien.
8. Pengembalian/ pemulangan ke daerah asal klien.

Proses awal klien masuk rumah singgah untuk melakukan pembinaan yaitu seperti keterangan dari Kabid Rehabilitas Sosial bapak M. Toyib, S.Ag mengatakan:

“Melakukan kegiatan penjangkauan di mana di situ ada gelandangan pengemis maupun tuna sosial lain. Selain konsen dengan penjangkauan itu juga bekerjasama dengan Satpol PP Kota Jambi, untk melakukan penertiban gepeng. Kalau kegiatan penjangkauan itu kami ke jalan-jalan yang berpotensi, kami ingatkan mereka jangan mengemis disini dilarang, melanggar peraturan, terus kami juga melakukan pembinaan arti gepeng yang ditertibkan oleh Satpol PP di bawa ke rumah singgah.”³²

Berdasarkan keterangan di atas bahwa awal mulanya yaitu pihak Dinas Sosial melakukan tindakan penjangkauan dengan bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan para gepeng, kemudian gepeng yang sudah terjaring akan dibawa ke rumah singgah untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Setelah mereka berada di rumah singgah maka akan dilakukan assesment untuk mengidentifikasi para gepeng. Pembinaan yang dilakukan

³² Wawancara dengan Bapak M. Toyib, S.Ag selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Pada, 17 April 2023.

selama 3 sampai 7 hari. Ini sesuai dengan pernyataan kepala rumah singgah bapak Muliadi yaitu:

“Penitipan dari satpol pp, kemudian satpol PP rujuk ke kita, lalu kita melakukan sop kita pertama biodata, assement, pembinaan minimal 3 hari.”³³

Proses selanjutnya yaitu, kegiatan pembinaan yang dilakukan di rumah singgah Kota Jambi terdapat dua macam bimbingan, seperti yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitas Sosial bapak M. Toyib, S.Ag yaitu:

“Pembinaan di rumah singgah kota jambi ada Pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Di pembinaan aqidah para klien diberikan dakwah, ceramah siraman rohani supaya mereka tidak lagi melakukan hal hal yang memang tidak dibolehkan Untuk pembinaan fisik itu dilakukan oleh tim yang berasal dari dinas social kota jambi, kemudian fisik dilakukan oleh rindam Iskandar muda, yaitu kegiatan seperti olahraga, sedikit kegiatan yang bisa membirakan efek jera khususnya bagi anak-anak jalanan yang memang sering melanggar”³⁴

. Adapun untuk melihat evaluasi pembinaan Dinas Sosial Kota Jambi yaitu dari beberapa indikator yaitu:

1. Input

Input, yaitu diamati dari gejala adalah sumber daya. Sumber daya yaitu semua potensi yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber daya program pembinaan

³³ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi pada, 18 April 2023.

³⁴ Wawancara dengan Bapak M. Toyib, S.Ag selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Pada, 17 April 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

gepeng di rumah singgah di kota jambi terdiri dari sumber daya manusia, sumberdaya pendukung dan bahan- bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pembinaan gepeng.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di rumah singgah Kota Jambi berjumlah 7 orang. Seperti yang disampaikan kepala rumah singgah Bapak Muliadi yaitu:

“Pengurus dari rumah singgah ini, koordinator satu abistu koordinator bertanggung jawab kepada kasi, kasi kepada kabit dibawah bidang resource lebih kurang 7 orang.“Ya di tempat kita ada pekerja sosial, Pekerja sosial itu kan SK dari kementerian, dan orangnya di tempatkan di dinas kita.”³⁵

Rumah Singgah Kota Jambi memiliki pekerja sosial, tentu bila ada pekerja sosial maka ia akan lebih berkompeten di bidangnya dimana memiliki kompetensi dalam penanganan masalah sosial daripada pegawai berlatar belakang umum yang bekerja sebagai pembimbing akan menerapkan pola pembinaan dari pengalaman selama bekerja di rumah singgah, tidak ada pengalaman dari luar. Namun bila dilihat di lapangan pengurus rumah singgah terlihat sepi hanya ada beberapa orang saja.

b. Sumber Daya Pendukung

Dalam pembinaan gepeng diperlukannya sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung yang diperlukan untuk

³⁵ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi pada, 18 April 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melaksanakan pembinaan gepeng di rumah singgah Kota Jambi meliputi perlengkapan administrasi, fasilitas gedung sarana/prasarana pembinaan dan lain sebagainya.

Rumah Singgah Kota Jambi memiliki satu ruangan administrasi. Di ruangan tersebut tempat dilakukannya pengadministrasian para gepeng yang akan dibina di rumah singgah, juga tempat menyimpan semua data yang berkaitan dengan rumah singgah.

Fasilitas yang sebenarnya sudah cukup mendukung namun terlihat sedikit tidak terurus padahal ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh rumah singgah kepada klien. Seperti kamar tidur yang disertai tempat tidur dan lemari untuk menyimpan barang mereka, kamar mandi, mushalla dan lain-lain.

Seperti keterangan dari Kabid Rehabilitas Sosial Bapak M. Toyib, S.Ag menyatakan:

“fasilitas tentunya Ada seperti kamar tidur,kamar mandi ada tempat tidur, awalnya tempat tidur itu lengkap ada kasur dan bantal namun dengan perkembangannya mereka yang dibina malah merusak fasilitas yang ada agar mereka bisa melarikan diri biasanya dilakukan oleh anak punk”³⁶

Dan berdasarkan pernyataan tambahan dari pengurus rumah singgah Bapak Muliadi yaitu:

³⁶ Wawancara dengan Bapak M. Toyib, S.Ag selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Pada, 17 April 2023.

“Kalau untuk klien, makan 3 hari sekali abistu pakaian menggunakan pakaian istilahnya ada tulisannya binaan rumah singgah, perlengkapan mandi seperti handuk dan lain-lain”.³⁷

Dan sesuai pernyataan klien rumah singgah Saudara MN menyatakan :

“Kami tadi malam ditangkap, tidur disini berempat, kasurnya dibawah ada bantal satu seorang, malam ada dikasi makan sama sarapan tadipagi, kalau mandi ada di handuk sama sabun di kasi sama abang itu”³⁸

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sudah adanya usaha dari dinas sosial untuk melengkapi fasilitas, namun ternyata dari pihak klien merusak tempat tidur sebagai bentuk ketidaksukaan mereka terhadap sanksi yang diberikan. Tentunya hal ini menyebabkan kurang mendukung dalam proses pembinaan terutama bagi kenyamanan klien nantinya.

Tentunya dalam tahap ini diperlukannya beberapa perbaikan agar manfaat bisa dirasakan langsung oleh klien.

c. Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan pembinaan di rumah singgah berasal dari APBK. Ini sesuai dengan pernyataan Kabid Rehabilitas Sosial Bapak M. Toyib, S.Ag yaitu:

“Anggaran belum memadai untuk melakukan pembinaan, idealnya seperti daerah lain ya, yang sudah bagus untuk pembinaan gepeng tentu berhubungan dengan anggaran”³⁹

³⁷ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi pada, 18 April 2023

³⁸ Wawancara dengan klien rumah singgah saudara MN pada, 16 April 2023

³⁹ Wawancara dengan Bapak M. Toyib, S.Ag selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Pada, 17 April 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dan sesuai pernyataan Kepala rumah singgah Bapak Muliadi menyatakan:

“Sisi anggaran dari APBDK, tidak ada pihak ketiga”⁴⁰

Dana yang didapatkan tentunya harus diolah sebagaimana mestinya guna untuk memenuhi kebutuhan para klien, bahwa jumlah anggaran belum cukup untuk melakukan pembinaan secara optimal. Berdasarkan keterangan tersebut bahwa tidak ada bantuan dalam hal anggaran dari pihak ketiga dalam pembinaan di rumah singgah.

2. Proses

Fokus penilaian indikator ini berupa pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan yang meliputi tahap pelaksanaan pelayanan, keterlibatan partisipasi penerima manfaat, hubungan antar klien dan dengan pengurus rumah singgah pengawasan dan pemantauan perkembangan terhadap klien.

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan Dinsos mentransformasikan pelayanan yang cocok untuk keadaan gepeng di Kota Jambi adalah pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Gepeng yang ada di Kota Jambi banyak kiriman dari luar daerah, karena mereka ingin mendapatkan uang dengan mudah dan instan. Maka dari hal itu fokus Dinsos mengatasi mental dari para gepeng agar bisa merubah pola pikir mereka yang sudah terlanjur salah, tentunya hal itu tidak akan mudah apalagi pembinaan mental/ aqidah ini hanya

⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi pada, 18 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berupa ceramah dan masukkan, belum tentu mereka memahami dan meresapi apa yang disampaikan. Pembinaan fisik juga belum bisa dikatakan mampu masalah gepeng ini, karena pembinaan fisik hanya akan membuat mereka jera pada saat itu saja, tidak ada sifat jangka panjang yang membuat mereka mau berubah menjadi masyarakat dengan fungsi sosial yang sebenarnya.

Berhubungan dengan partisipasi klien dalam mengikuti kegiatan pembinaan, memang hampir semua kegiatan terlaksana, namun beberapa kali tampak dalam pelaksanaan kegiatan terkesan hanya secara formalitas, masih ada klien kurang mengikuti kegiatan dengan baik, tetapi ada juga yang dengan pasrah mengikuti pembinaan dengan baik. Berkaitan dengan hubungan antara klien dan pengurus rumah singgah komunikasi terjalin cukup baik, namun terkadang juga kurang harmonis hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala rumah singgah Bapak Muliadi yaitu:

“Istilahnya dia tergantung kasus, ni kan ada beberapa jenis pmks kalau hubungan kadang- kadang harmonis kadang engak tergantung situasijuga”.⁴¹

Tentunya dari pihak pengurus rumah singgah harus senantiasa memastikan kebutuhan dasar para klien bisa terpenuhi, harus menjalin hubungan baik agar klien merasa nyaman dan memungkinkan keadaan bisa merubah tingkah laku serta pikiran dari si klien agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Dari sisi pengawasan,

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi pada, 18 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

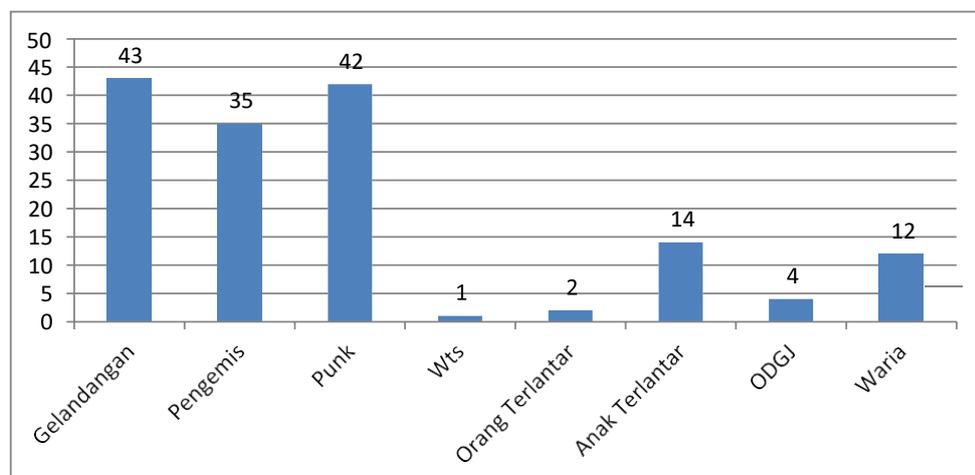
pihak dinas sosial jika ada klien yang berada di rumah singgah maka setiap hari akan mengawasi keadaan kliennya, dan di rumah singgah ada 2 security yang bertugas menjaga keamanan serta mengawasi para klien di rumah singgah.

3. Output

Jumlah dan ketepatan sasaran penerima pelayanan di rumah singgah dapat dikatakan masih belum optimal, walaupun tim dari dinas sosial terus melakukan penjangkauan terhadap sasaran utama yaitu para gepeng dan anak jalanan di mana saja tempat-tempat berpotensi ditemukannya pengemis. Jumlah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani dalam perbandingan dua tahun ini tampak berubah hal ini terlihat dari grafik di bawah ini.

Grafik 4.1

Jumlah PMKS yang ditangani Dinsos Kota Jambi Januari s/d Desember⁴²



⁴² (sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

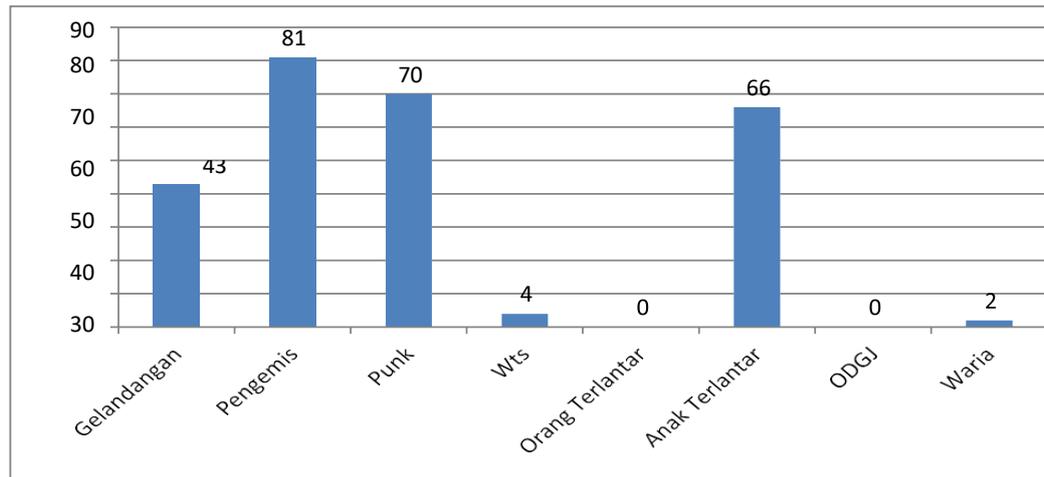
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tahun 2021

Grafik 4.2

**Jumlah PMKS yang ditangani Dinsos Kota Jambi
Januari s/d Oktober Tahun 2022⁴³**



Berdasarkan grafik di atas kita dapat membandingkan bahwa pada tahun 2021 jumlah PMKS sekitar 153 orang dan pada tahun 2022 jumlah meningkat menjadi 266 orang. Bila melihat jumlah gelandangan dan pengemis jumlahnya juga meningkat, pada tahun 2021 jumlahnya hanya 78 orang sedangkan pada tahun 2022 jumlah gepeng sejak Januari sampai Oktober sudah mencapai 124 orang.

Angka tersebut tentunya akan diharapkan terus menurun karena dilihat dari sisi kualitas pelayanan yang diberikan sebenarnya baik, namun seperti yang disampaikan Kabid Rehabilitas Sosial dan Kepala rumah singgah SDM dan fasilitas kurang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan hanya sekadar saja tetapi tetap mengikuti SOP.

⁴³ (sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2023)

4. Outcomes

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama sehubungan dengan dicapainya indikator positif maupun negatif dari kinerja dampak (impact), yakni adanya sasaran kinerja yang memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap pembinaan yang telah diterapkan. Sisi positif bahwa ada beberapa dari klien yang sudah dibina untuk mau berubah sesuai dengan pernyataan Saudara MN yaitu:

“Setelah keluar dari sini kami mau cari kerja aja, dia mau lanjut sekolahnya, sebenarnya dulu udah ada kerja cuma capek, tapi ini mau berubah kok gak mau nyusahin orang tua lagi”⁴⁴

Sisi positif lain yaitu kerja sama dari beberapa pihak dalam melakukan pembinaan di rumah singgah yaitu Dinas Pemberdayaan dan Dinas Sosial Kota Jambi untuk memberikan materi serta arahan untuk para gepeng. Sedangkan untuk sisi negatif bahwa kinerja dari pekerja atau pengurus rumah singgah belum optimal hal ini dilihat dari berbagai kendala yang dihadapi para pengurus dalam melaksanakan tahapan tahapan kegiatan pelayanan di rumah singgah, seperti ketidakharmonisan antara klien maupun pengurus rumah singgah. Lemahnya sanksi yang diberikan oleh pihak dingsos membuat para gepeng tidak jera sehingga mereka melakukan kegiatan yang sama untuk memperoleh pundi uang dengan cara yang instan karena lumayan banyak gepeng yang tertangkap hanya orang itu saja. Dampaknya jmlah tidak berkurang bahkan bisa jadi malah bertambah.

⁴⁴ Wawancara dengan klien rumah singgah saudara MN pada, 16 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Kendala program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Jambi.

Tentunya dalam menjalankan program pembinaan tidak semuanya berhasil begitupun program pembinaan Dinas Sosial Kota Jambi memiliki banyak hambatan yaitu :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada kurang memenuhi standar ataupun kurang sesuai harapan maka pelaksanaannyapun akan kurang optimal untuk melakukan kegiatan pembinaan. Sarana merupakan salah satu alat dan bahan untuk melakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Apabila hal ini mendukung maka akan berdampak positif agar berkurangnya jumlah gepeng karena telah dilakukan pembinaan sesuai kemampuan mereka yang dengan salah satunya menggunakan prasarana yang ada. Hal ini selaras dengan pernyataan pengurus rumah singgah Bapak Muliadi yaitu: “Prasarana yang ada bisa dikatakan masih di bawah standar.”⁴⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut Sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pembinaan bisa dikatakan sangat minim. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pasal 47 Standar minimum sarana dan prasarana rumahsinggah meliputi:

⁴⁵ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi pada, 18 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
- b. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
- c. Peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
- d. Pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.⁴⁶

Dari semua syarat tersebut tidak semua di miliki Rumah singgah Dinas Sosial Kota Jambi atau fasilitas sudah ada namun tidak ada optimalisasi untuk menggunakannya agar lebih berdayaguna. Tentu disini perlu dilakukan pembenahan sedemikian rupa agar proses pembinaan menjadi lancar dan berhasil.

2. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM)

Melihat keadaan dilapangan SDM yang ada sangat terbatas, idealnya dalam program pembinaan di rumah singgah, harus adanya beberapa pelaku seperti adanya klien, ada pengasuh dan pengelola, namun selama ini menurut kejadian yang ada pengasuh dan pengelola disamakan saja. Padahal pengasuh adalah orang yang

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pasal 47 Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertanggungjawab dalam mengawasi, membimbing para gepeng dan pengelola adalah orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal administrasi dan manajemen dalam rumah singgah. Hal ini sesuai dengan seperti keterangan dari Kabid Rehabilitas Sosial yaitu:

“Memang secara SDM bisa dikatakan juga kurang karena idealnya rumah singgah itu adanya pengasuh, perawat Cuma karena kita sifatnya pembinaan walaupun kita tidak ada maka kita akan sesuaikan”.⁴⁷

Masih diperlukannya perhatian dalam hal ini karena SDM yang tersedia sangat minim bisa dikatakan bahwa beberapa orang bahkan merangkap menjadi pengurus dan melakukan kegiatan lain untuk menyesuaikan, tentu hal ini akan berakibat pelayanan akan kurang optimal untuk mengatasi masalah daripada gepeng.

3. Mental para Klien

Kondisi psikologis gepeng sudah sejak lama memiliki sifat malas atau tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, cacat secara fisik dan atau secara mental menyebabkan dan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan menyebabkan kurangnya partisipasi klien dalam setiap kegiatan pembinaan, sikap dari klien yang masih acuh tak acuh, malas, kurang fokus, masih terjadi pelanggaran tata tertib dan lain sebagainya.

Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Rumah Singgah bapak Muliadi yaitu:

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak M. Toyib, S.Ag selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Pada, 17 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Faktor penghambat kurangnya minat dari si kliennya, solusinya yaitu sanksi yang berlipat kepada gepeng yang pernah tertangkap.”⁴⁸

Semua pembinaan akan sia-sia dan tidak berpengaruh apabila dari pihak klien tidak mau berubah dan tidak ada minat untuk fokus agar mereka bisa kembali mandiri. Maka pembinaan yang ada berarti belum mampu membuat penerima manfaat mengalami kemajuan secara manfaat dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

C. Upaya Program Dinas Sosial Kota Jambi dalam Menghadapi Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kota Jambi

Adapun upaya program dinas sosial kota jambi dalam menghadapi permasalahan kesajahteraan sosial di kota jambi di antaranya :

1. Pembinaan mental/aqidah, pembinaan yang dilakukan yaitu dengan memberikan dakwah kepada klien atau ceramah siraman rohani Sebagai upaya untuk menangkal sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Semua disesuaikan dengan kondisi saat ini, yang dikaitkan dengan ajaran agama. Dalam pembinaan mental/aqidah Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Kota Jambi untuk menyampaikan beberapa materi. Klien harus dibentuk mentalnya agar bisa berubah ke arah yang lebih baik, apabila masih ada pengemis berada di sekitaran Kota Jambi. Tetapi bila klien sendiri mentalnya sudah terbiasa untuk memilih jalur

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi pada, 18 April 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

instan maka akan susah di bentuk, akan timbul sifat malas dan ingin mendapatkan uang dengan cara paling mudah meskipun harus mengemis. Tentunya harapan dari kegiatan ini agar gepeng mempunyai bekal keagamaan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dan tidak melanggar aturan lagi.

2. Pembinaan fisik, pembinaan ini dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan dengan memberikan pembelajaran fisik seperti olahraga dengan bertujuan membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Namun terkadang latihan fisik bisa dilakukan lebih keras sebagai upaya peringatan agar memberikan efek jera terutama kepada gelandangan ataupun anak jalanan seperti anak punk. Biasanya sebelum dilakukan tes fisik para klien akan di cukur dulu rambutnya ini sesuai dengan pernyataan saudara MN yaitu:

“Kami setelah ditangkap, pagi siap sarapan di pangkas rambutnya sama bapak security, kami disuruh lari-lari lapangan pushup juga”⁴⁹

Hal tersebut bertujuan agar para gepeng tampak lebih rapi dan bisa menghilangkan kebiasaan buruk yang biasanya terlihat kumuh dan jorok tentu saja itu akan membuat mereka menjadi lebih baik. Pembinaan yang dilakukan hanya sebatas pembinaan mental/aqidah dan fisik tentunya tidak memberikan efek yang terlalu besar dalam mengurangi jumlah gepeng karena efek jera tidak terlalu berat sehingga dikhawatirkan gepeng kembali melaksanakan aksinya.

⁴⁹ Wawancara dengan klien rumah singgah saudara MN pada, 16 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Maka akan lebih berpengaruh bila ada diadakan pembinaan tambahan oleh pihak Dinas Sosial Kota Jambi misalnya pembinaan yang berkaitan dengan keterampilan. Namun berdasarkan pernyataan Kabid Rehabilitas Sosial bapak M. Toyib, S.Ag sebagai berikut:

“Kita sedianya memberikan keterampilan modal usaha, namun kedalanya mereka itu bukan warga Kota Jambi, kalau sekiranya mereka itu orang Jambi pasti kami akan sekiranya memfasilitasi, dan untuk diketahui adalah pengemis-pengemis yang kami bina itu adalah orang-orang yang sama.”⁵⁰

Dan pernyataan dari kepala rumah singgah bapak Muliadi bahwa:

“Kegiatan lain sambil kita tanya bakat mereka itu apa, nanti bisa kita koneksi kalau dia memang warga kota jambi bisa bekerjasama dengan dinas tenaga kerja, tetapi kalau dia non warga kota jambi kita pulangkan ke daerah masing-masing ke daerah asalnya, membuat surat pernyataan bahwa tidak mengulangnya lagi dan ditanda tangan.”⁵¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa ada keinginan dari pihak Dinas Sosial Kota Jambi untuk membuat kegiatan dengan tujuan mengasah keterampilan para klien, namun terhambat karena kebanyakan gepeng yang terjaring adalah berasal dari luar Kota Jambi, sehingga hanya sekadar dibina beberapa hari kemudian dipulangkan ke daerah asal, pihak klien juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi aksinya dan apabila dia mengulangi lagi maka masa binaan bisa dilipat gandakan. Sedangkan untuk

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak M. Toyib, S.Ag selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Pada, 17 April 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi pada, 18 April 2023.

warga Kota Jambi setelah menjalani pembinaan di rumah singgah akan direkomendasikan ke pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi agar memudahkan mereka dalam menemukan pekerjaan baru yang lebih layak, namun ini tentunya sudah tidak dalam pengawasan rumah singgah lagi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah pihak terkait dengan Evaluasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS (Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi Dinas social Kota Jambi dalam melaksanakan penanggulangan gelandang dan pengemis, tentunya hal ini menyediakan rumah singgah yang mempunyai Standar Operasional Prosedur untuk membina para gepeng, Dinas Sosial juga melakukan tindakan perjangkauan dengan berkerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan para gepeng.
2. Faktor penghambat program pembinaan dinas sosial Kota Jambi dalam mengurangi gelandang dan pengemis di Kota Jambi adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana (2) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (3) Sikap klien dalam proses pembinaan.
3. Program pembinaan Dinas Sosial Kota Jambi dilakukan di rumah singgah. Dari sisi input, sumber daya manusia yang ada di rumah singgah ada sekitar 7 orang, sumber daya pendukung yang ada sarana prasarana masih seadanya saja, belum bisa mengoptimalkan pembinaan yang dilakukan. Proses pembinaan yang ada di rumah singgah ada 2 macam yaitu, pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Pembinaan mental/aqidah dilakukan oleh dinas pemberdayaan dengan memberikan dakwah, pembinaan fisik dilakukan oleh dinas sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan latihan fisik seperti olahraga. Output yang ada yaitu ketepatan sasaran penerima pelayanan di rumah singgah dapat dibilang sudah baik. Namun jumlah gepeng pada tahun 2021 ke 2022 mulai meningkat. Dampak positif yang ada yaitu adanya kerja sama antar beberapa pihak untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan dampak negatif yaitu masih ada rasa tidak jera gepeng yang sudah terjaring karena lemahnya sanksi yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Jambi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Mengurangi Gelandang dan Pengemis di Kota Jambi peneliti/penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak Dinsos harus terus mempertahankan yang telah baik seperti kerjasama untuk terus terjalinnya koordinasi antar instansi terkait untuk melakukan pembinaan.
2. Melakukan Kegiatan Rutin yakni penjangkauan ke daerah yang dianggap potensial terhadap gepeng, peran aktif dari masyarakat dalam bentuk memberikan laporan kepada instansi terkait yang menangani gelandangan dan pengemis .
3. Pembinaan yang dilakukan bukan hanya pembinaan mental dan fisik saja, tetapi bisa melihat kemampuan atau bakat yang dimiliki setiap klien, keterampilan inilah yang nantinya akan menjadi bekal mereka setelah keluar dari pembinaan di rumah singgah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Faktor penghambat yang ada perlu dikurangi dan diperbaiki agar pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.
5. Keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana harus cepat diatasi agar setiap kegiatan pembinaan itu bisa optimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Ayunda,Rahmi. Disemadi, Hari Sutra. Wijaya,Rian. *Kebijakan Kawasan Bebas Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam : Suatu Kajian Hukum Prespektif SDGs*. Jurnal Komunitas Yustia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 3 No 3 (2020) Hlm, 295-296

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*,(Bandung: CV.Pustaka Setia,2014)

Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.Yogyakarta.2011.

H.M.Hasbullah,kebijakan Pendidikan,PT Raja Grafindo Persada,jakarta,2015.

Kalimasada, Mas Dinar Angka Wijaya. *Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Kampung Anak Negeri Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara. 2015

Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* vol 20, no. 2 (2015): 243-260.

Landupari, A. T., D. Setyawan, and D. U. Ra'is. "Implementasi Kebijakan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)." PhD diss., Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2022.

Matthew Miles B, Huberman A. Miche, *Analisis data kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992),

Nurliani, Ivo. "Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak (Studi Kasus Masalah Fakir Miskin).",Perpustakaan Unri

Nagaring, Denny David, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)." *GOVERNANCE* 1, no. 2 (2021).

Nana Sudjana, *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013,

Susanti *Jak Publik Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan PMKS (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)* vol 1, no. 3 (2020).

Sahrul, Muhammad. "Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kota Depok." *KAJIAN*: 36. (2017)

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta , 2012, hlm. 120-122

Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Jambi: Syariah Press 2014)

Singaribun dan Sofia Effendi, *Metode Penelitian Surve* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008)

Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi*, (Jakarta: PTRajaGafindoPersada, 2011) hlm. 28.

Yunus, Eko Yudianto. "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 3, no. 1 (2021): 62-70.

B. Lain-lain

Badan Data Terpadu (BDT) Kota Jambi 2020

Departemen Agama, *Mushaf aysah: Al-quran dan terjemahan* (bandung : jabal Rudhotul Janna, 2010),

Kompas.com, "Diperkirakan ada 77. 500 gepeng di kota kota besar di Indonesia", di akses pada 18 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 1

Gambar Wawancara Kepala Dinas Sosial Kota Jambi



Gambar Wawancara Bersama Staff

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lampiran 2

Gambar Hasil Lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar Dokumen



Lampiran 3

Instrumen Pengumpulan Data

NO.	Nama	Jabatan	Usia
1	M. Toyib, S.Ag	Kabit Rehabilitasi	43 Tahun
2	Bapak Muliadi	Kepala Rumah Singgah	42 Tahun
3	Klien	Klien	63 Tahun
4	Bapak Suryadi	Masyarakat	40 Tahun
5	Tabrani	Masyarakat	30 Tahun

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing narasumber berdasarkan data yang diberikan:

1. M. Toyib, S.Ag (Kabit Rehabilitasi) :

- a. Sejak kapan Anda terlibat dalam program rehabilitasi untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial?
- b. Apa saja aktivitas atau program yang dilakukan dalam upaya rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial?
- c. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi yang telah dilakukan?

2. Bapak Muliadi (Kepala Rumah Singgah) :

- a. Sejak kapan Rumah Singgah beroperasi untuk menyediakan tempat tinggal bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial?
- b. Apa saja fasilitas dan layanan yang tersedia di Rumah Singgah untuk membantu para penghuninya?
- c. Bagaimana Anda menilai dampak Rumah Singgah terhadap kesejahteraan sosial para penghuninya?

3. Klien:

- a. Bagaimana Anda menilai program yang telah Anda ikuti di bidang kesejahteraan sosial?
- b. Apakah ada perubahan atau perbaikan yang Anda rasakan setelah mengikuti program tersebut?
- c. Apa yang dapat ditingkatkan dari program tersebut agar lebih efektif dalam membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

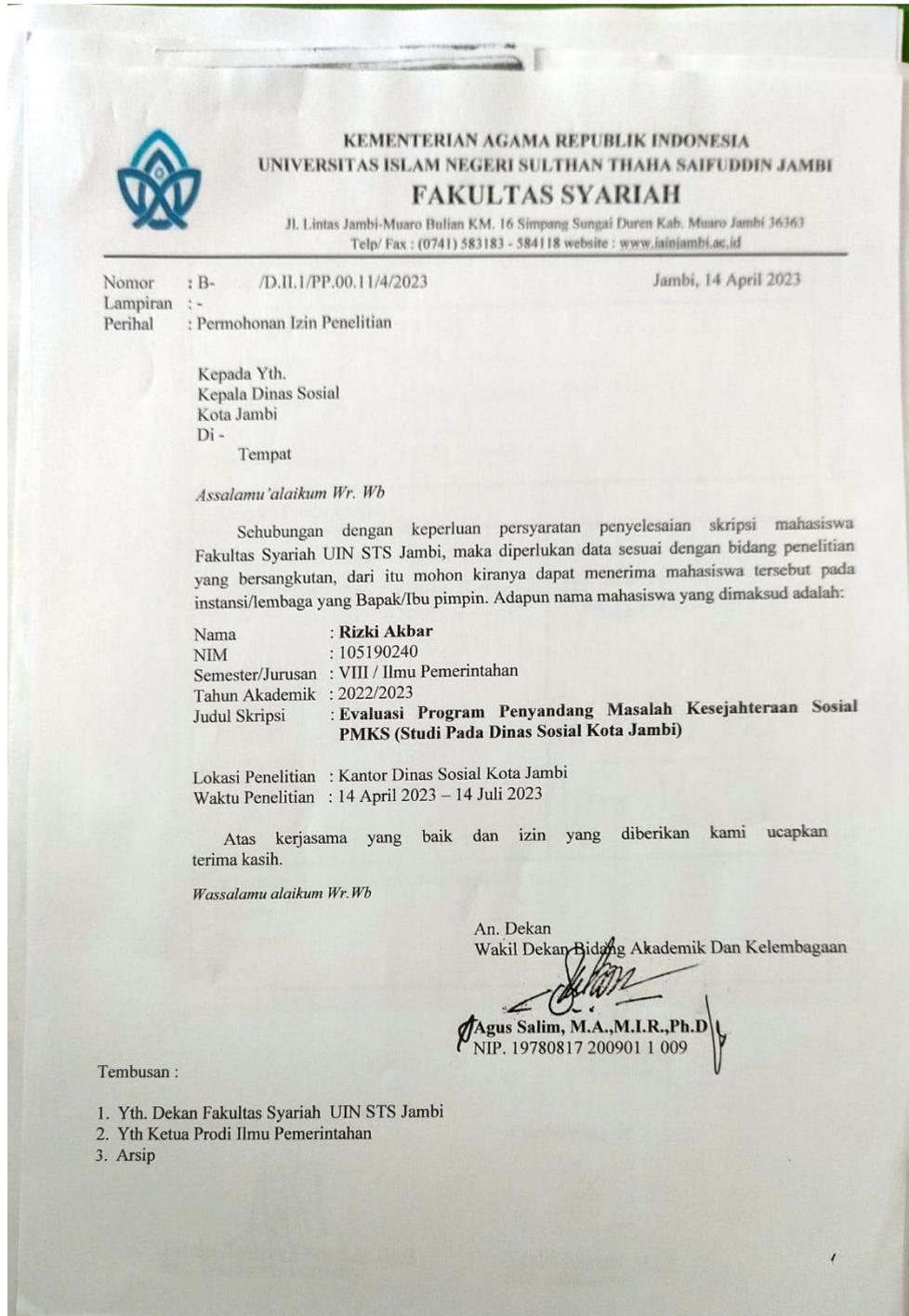
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Bapak Suryadi (Masyarakat):

- a. Apa pandangan Anda tentang program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait penyandang masalah kesejahteraan sosial?
- b. Apakah Anda merasakan adanya dampak positif dari program-program tersebut di lingkungan sekitar?
- c. Menurut Anda, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas program kesejahteraan sosial di Kota Jambi?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- /D.II.1/PP.00.11/4/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 14 April 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial
Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

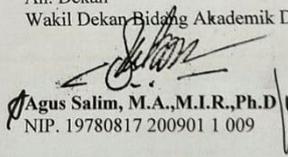
Nama : Rizki Akbar
NIM : 105190240
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Evaluasi Program Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS (Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi)**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Sosial Kota Jambi
Waktu Penelitian : 14 April 2023 – 14 Juli 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)



Nama : Riski Akbar
Nim : 105190240
TTL : Sarolangun 7 November 2000
Jenis Kelamin : Laki Laki
Alamat : Tangerang Kota, Ciledug.
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
No Wa : 082260740566
Alamat Email : rasokiakbar@gmail.com
Nama Orang Tua :
Ayah : Js Daulay
Ibu : Nurhayani

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 201 Batang Merangin	: 2012
2. SMPN 34 Sidodadi	: 2015
3. SMAN 1 Sarolangun	: 2019
4. UIN STS Jambi	: 2023

Motto Hidup: "Jangan pernah mencintai jika takut disakiti karena Wanita tak akan pernah mengerti tentang sebuah ketulusan yang sulit untuk dimiliki"

Jambi, 2023
Penulis

Riski Akbar
NIM. 105190240